ANALISA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN DI BPP LUBUK ALUNG SINTUK TOBOH GADANG SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN

SKRIPSI

OLEH

MARSITAH
NO.BP. 04115022

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

ANALISA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN DI BPP LUBUK ALUNG SINTUK TOBOH GADANG SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan proses perencanaan program kegiatan penyuluhan pertanian sebelum dan setelah pemekaran wilayah, (2) Mendeskripsikan pelaksanaan program kegiatan penyuluhan pertanian sebelum dan setelah pemekaran wilayah, dan (3) Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPP dan petugas penyuluhan pertanian dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Penelitian ini dilaksanakan di BPP Lubuk Alung Sintuk Toboh Gadang (Lastoga). Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja *(puposive)* karena wilayah ini baru melaksanakan pemekaran wilayah. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan terhitung bulan Mei – Juni 2009. Metode Penelitian adalah studi kasus (*case study*), dengan metode pengambilan responden secara komprehensif. Data dianalisa menggunakan metoda deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program penyuluhan dilaksanakan secara bersama dengan para stakholders yang ada. Penetapan masalah program dibuat oleh PPL berdasarkan input dari pengurus kelompok tani. Selain itu dalam penyusunan program penyuluhan pertanian, penyuluh juga memperhatikan dan menjadikan program dari dinas sebagai rujukan sehingga program penyuluhan dari tahun ke tahun ada kemiripan, walaupun setelah pemekaran mengalami peningkatan karena ada penambahan materi yang diberikan kepada sasaran. Pelaksanaan program kegiatan penyuluhan sebelum dan setelah pemekaran mengalami perubahan. Ini dapat dilihat dari unsur-unsur penyuluhan pertanian itu sendiri, perubahan materi yang disampaikan dari tahun ke tahun, metoda yang digunakan juga mengalami perubahan yang dapat membantu penyuluh dalam melakukan penyuluhan. Namun, pelaksanaan program penyuluhan pada BPP ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan antara lain, dimana rata-rata penyuluh yang ada hanya tamatan SPP dan D3, sarana dan prasarana pendukung yang digunakan dalam penyuluhan baik itu berupa sarana transportasi, dan alat bantu dan alat peraga dalam penyuluhan, belum terpenuhi semuanya untuk masing-masing penyuluh disetiap wilayah binaan.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian mayoritas penduduknya. Tidak mengherankan jika Indonesia mampu melakukan swasembada beras pada tahun 1984. Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras ini tidak terlepas dari peranan penyuluhan pertanian. Karena kegiatan penyuluhan pertanian merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktifitas pertanian (Husodo, 2004).

Dan 20 tahun kemudian yaitu pada tahun 2004, Indonesia kembali berhasil mencapai swasembada beras dengan produksi 54,09 juta ton gabah kering giling setara 33 juta ton beras dengan konversi 0,632. Saat itu merupakan produksi beras tertinggi selama republik ini berdiri (Bambang Yudhoyono, 2008). Dan 4 tahun kemudian, akhirnya Indonesia kembali mencapai swasembada beras yaitu pada tahun 2008. Swasembada tahun 2008. ini berbeda dibandingkan tahun 1984 karena swasembada kali ini tanpa sedikit pun dibarengi impor beras. Lain cerita pada 1984, dimana swasembada masih dibarengi dengan impor beras 414.300 ton (Pudjiatmoko, 2008).

Penyuluhan pertanian adalah suatu proses dinamis yang berhubungan dengan perubahan prilaku masyarakat tani, ini berarti bahwa penyuluhan pertanian harus selalu berorientasi ke depan yang lebih baik dari sekarang. Implikasinya adalah kepentingan petani dalam mengembangkan usaha taninya baik yang sedang dilaksanakan ataupun pada masa yang akan datang, yang harus diupayakan pemecahan masalahnya oleh mereka sendiri melalui proses belajar mengajar agar mereka dapat mengatasinya secara professional (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Padang Pariaman, 2008). Penyuluhan pertanian merupakan upaya pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis terutama melalui pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri (*helping farmers to help themselves*) baik di bidang

ekonomi, sosial, dan politik sehingga dapat meningkatkan produktifitas pendapatan dan kesejahteraan mereka (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumbar, 2004).

Menurut Dinas Pertanian Propinsi Sumbar (2004) penyelenggaraan penyuluhan pertanian ke depan harus mampu mengubah citra petani sebagai manusia seutuhnya, sehingga petani akan menjadi subyek dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu, penyuluhan pertanian ke depan bukan proses transfer teknologi tapi proses pemberdayaan dan pendidikan petani bukan mengajari petani tetapi mengajar untuk bertani.

Revitalisasi dari penyuluhan pertanian diharapkan dapat mengembangkan sistem dan kelembagaan penyuluhan pertanian, mengembangkan program dan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian serta mengembangkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, khususnya menyangkut peran aktif dari pemerintah kabupaten/kota.

Penyuluhan itu keterlibatan dari seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Maka istilah penyuluhan bervariasi menurut bidang terapannya, untuk itu pemberian wilayah kerja dari penyuluh ini ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran dari program utama penyuluhan pertanian dan perkembangan sosial yang nyata (Ban dan Hawkins, 1999).

Dalam dunia pertanian, penyuluh dapat bertindak sebagai pakar yang memahami cara memecahkan persoalan petani, atau sebagai pembimbing atau penasehat para petani dalam menemukan masalah yang dihadapinya berdasarkan perencanaan dari penyuluh pertanian. Untuk itu hal yang paling penting dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada, maka diharapkan kepada mereka adanya hubungan secara timbal balik (Ban dan Hawkins, 1999).

Di masa yang akan datang penyuluh pertanian akan dituntut untuk bekerja secara profesional. Dimana penyuluh pertanian akan selalu mengutamakan teknologi baru, dan teknologi baru ini akan dikembangkan kepada petani sesuai dengan kehendak dan usahanya untuk meningkatkan produk usaha taninya, tingkat

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

a. Perencanaan program penyuluhan yang dilakukan di BPP Lubuk Alung Sintuk Toboh Gadang dilaksanakan secara bersama dengan para stakholders yang ada. Penetapan masalah program dibuat oleh PPL berdasarkan input dari pengurus kelompok tani. Selain itu dalam penyusunan program penyuluhan pertanian, penyuluh tetap memperhatikan dan menjadikan program dari dinas sebagai rujukan sehingga program penyuluhan dari tahun ke tahun ada kemiripan, walaupun setelah pemekaran mengalami peningkatan karena ada penambahan materi yang diberikan kepada sasaran.

b. Pelaksanaan program kegiatan penyuluhan di BPP Lubuk Alung Sintuk Toboh Gadang sebelum dan setelah mengalami perubahan. Ini dapat dilihat dari unsur-unsur penyuluhan pertanian itu sendiri seperti materi yang disampaikan dari tahun ke tahun mengalami perubahan karena ada peningkatan yaitu adanya penambahan materi yang diberikan kepada sasaran, sehingga metoda yang digunakan juga mengalami perubahan serta faktor pendukung yang dapat membantu penyuluh dalam melakukan penyuluhan. Misalnya ketersediaan alat bantu yang belum sepenuhnya memadai karena alat bantu yang disediakan berupa kurikulum atau programa penyuluhan sedangkan alat peraga yang disediakan berupa koran "sinar tani". Selain itu, pelaksanaan program penyuluhan pada BPP ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan masalah yang dihadapi petani dan keluarganya.

c. Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik dari petugas penyuluh maupun dari lembaga penyuluhan itu sendiri yaitu BPP mempunyai atau mendapat hambatan-hambatan dalam melakukan fungsinya masing-masing. Hambatan ini ada yang berasal dari dalam dan ada yang berasal dari luar petugas penyuluh dan

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Hardiyansyah. 2008. *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik Pada Era Otonomi Daerah*. http://hardiyansyah-ahmad.blogspot.com. [31 Juli 2009]

Andri, Ferdi. 2005. *Respon Petani Terhadap Pelaksanaan Penyuluhan Di Wilayah Kerja BPP Nan Sabaris*. [Skripsi]. Fakutas Pertanian Universitas Andalas. Padang.

Anwar. 2005. *Implementasi Otonomi Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman*. [Thesis]. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Padang.

Astuti, Nuaraini Budi. 2006. *Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Di Kecamatan Kuranji*. Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.

Arifin. 2001. *Membangun Profesinalisme Penyuluhan Pertanian*. Sinar Tani. 14-20 Februari 2001.

Yudhoyono, Susilo Bambang. 2008. *Swasembada Beras Di Tahun 2008*. Kompas Kamis, 30 Oktober 2008. http://www.presidenri.go.id. [29 Maret 2009]

Ban, Van Den A.W dan H.S Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Jogyakarta.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). 2008. *Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian*. Lubuk Alung.

Departemen Pertanian. 2005. Sasaran Penyuluhan Pertanian (Modul Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi Penyuluh Pertanian). http://www.google.com. [29 Mei 2009]

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2004. *Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian*. Sumatera Barat.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. 2008. *Programa Penyuluhan Pertanian*. Kabupaten Padang Pariaman.

Husodo, Siswono Yudo, dkk. 2004. *Pertanian Mandiri Pandangan Strategis Para Pakar Untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Huri, Irdham. 2006. *Strategi Nagari Mempertahankan Keutuhan Wilayah dan Pemerintah dari Upaya Perluasan dan Pemekaran Wilayah*. [Thesis]. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Padang.